



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1129/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali dan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor .12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
16. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

Memperhatikan : 1. Surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/21143/Keuda Tanggal 12 Desember 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 900/1582/Usul.Bend/DISDIK/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025, perihal Usulan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam kolom 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Kerja dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berdasarkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang penetapan kegiatan/sub kegiatan yang dilimpahkan dengan mempertimbangkan besaran anggaran kegiatan SKPD.
- KEEMPAT : Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa.
- KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium atas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
- KETUJUH : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 19 Maret 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Makassar di Makassar di Makassar;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 1129/188.4.45/Tahun 2025

TANGGAL: 19 Maret 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT KERJA DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

NO.	UNIT KERJA / BIDANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
1	2	3
1	BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Nama : Dr. Syarifuddin, M.Pd NIP : 19690808 199503 1 002 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I (IV/b) Jabatan : Plt Kepala Bidang Sekolah Dasar
2	BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA	Nama : Sutardin AM, S.Pd., M.Pd NIP : 19750520 200012 1 003 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Plt Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama
3	BIDANG MANAJEMEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nama : Wahida Dahriana N, S.H NIP : 19850824 200903 2 003 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d) Jabatan : Kepala Bidang Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan
4	BIDANG PAUD DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Nama : Sriyenty Taufiq, S.Sos, M.Si NIP : 19750406 200801 2 011 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Plt Kepala Seksi Manajemen PAUD dan PNF

WALIKOTA MAKASSAR

MUYAFRI ARIFUDDIN